



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jl. Pahlawan No. 1 Painan

Telp/Fax. (0756) 21601 | Pos. El.: Inspektoratpessel@yahoo.co.id.

LAPORAN HASIL REVIU

Laporan Kinerja (LKj)

KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran 2025

Nomor : 700.1.2.8/367/INSP/2026

Tanggal : 12 Maret 2026





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LKj KECAMATAN PANCUNG SOAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Painan, 12 Maret 2026

Inspektur



Evafauza Yullasman, S.E., MSi.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19670712 199202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

Nomor : 700.1.2.8/367/INSP/2026 Painan, 12 Maret 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Reviu Laporan Kinerja Kecamatan Pancung
Soal Kabupaten Pesisir Selatan

Yth. Bupati Pesisir Selatan
di
Painan

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan pedoman reviu atas laporan kinerja. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Hasil Reviu (LHR) adalah penyajian manajemen dan substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 4 Maret 2026 (tiga hari kerja) sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.8.6.3/38/INSP/2026 tanggal 27 Februari 2026.

Reviu bertujuan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja perangkat daerah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Ruang lingkup pelaksanaan reviu yaitu reviu dilakukan terhadap metode pengumpulan data/informasi untuk menguji keandalan dan akurasi data dan informasi kinerja. reviu dilakukan atas keselarasan perencanaan strategis antar tingkat di dalam perangkat daerah, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan atas Laporan Kinerja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung penyusunan laporan kinerja (LKj).

Berdasarkan hasil pengujian atas kelengkapan dokumen reviu Laporan Kinerja (LKj) ditemui Dokumen LKj belum dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Renstra Perangkat Daerah
 - b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025
 - c. Indikator Kinerja Utama OPD
 - d. Dokumen Penjelasan IK Kepala OPD
 - e. Data Dukung Capaian Kinerja yang disajikan dalam LKj OPD
 - f. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Tahun sebelumnya
 - g. Realisasi Rencana Aksi Kepala OPD TW II Tahun 2025
 - h. Form Rekap DPA 2.2. SKPD TA 2025
 - i. Form keselarasan anggaran
 - j. Crosscutting (jika ada)
2. Pengujian atas kesesuaian outline LKj Perangkat Daerah dengan standar pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian outline LKj Perangkat Daerah dengan standar Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ditemui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pada BAB I belum menyajikan informasi tentang Aspek Strategi Organisasi dan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi.
 - b. Pada Laporan Kinerja belum melampirkan Perjanjian Kinerja Individu.
 3. Pengujian atas kesesuaian tujuan sasaran pada LKj OPD dengan Renstra dan PK tahun 2025

Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian tujuan sasaran pada LKj OPD dengan renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 ditemui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dokumen renstra tidak ada
 - b. Tujuan tidak ada dalam PK

- c. Indikator tujuan tidak ada dalam PK dan LKj
 - d. Sasaran dan indikator sasaran dalam dokumen PK sesuai dengan yang tercantum dalam LKj
4. Pengujian atas kesesuaian target kinerja pada LKj dengan target pada Renstra dan PK tahun 2025.
- Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian target kinerja pada LKj dengan target pada Renstra dan PK Tahun 2025 ditemui hal-hal sebagai berikut:
- a. Dokumen Renstra tidak ada
 - b. Penetapan target indikator kinerja pada LKj telah mengacu pada PK, namun tidak dapat dipastikan kesesuaiannya dengan Renstra karena dokumen Renstra tidak tersedia.
 - c. LKj sudah menyajikan cara menetapkan target.
 - d. Seluruh target kinerja yang dimuat pada dokumen PK telah disajikan dalam LKj
5. Pengujian atas kesesuaian capaian kinerja dengan data kinerja secara rinci/analisa yang memadai dalam LKj.
- Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian capaian kinerja dengan data kinerja dan telah diuraikan secara rinci/analisa yang memadai dalam LKj ditemui hal-hal sebagai berikut:
- a. Dokumen IKU tidak ada
 - b. Analisa LKj sudah menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target tahunan
 - c. Analisa LKj sudah menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah/periode renstra
 - d. Kesesuaian analisis kinerja pada LKj dengan data dukung yang bersumber dari IKU tidak dapat dipastikan karena dokumen IKU tidak tersedia
 - e. Perhitungan persentase capaian kinerja telah sesuai
 - f. Seluruh tujuan, sasaran dan indikator kinerja telah memuat capaian kinerja dan telah memuat analisa yang memadai
6. Pengujian atas kelengkapan penyajian LKj OPD dengan data pembanding yang dibutuhkan.
- Berdasarkan hasil pengujian atas penyajian LKj OPD dengan data pembanding yang dibutuhkan, ditemui hal-hal sebagai berikut:
- a. LKj telah menyajikan analisis data pembanding terget, realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir secara memadai.

- b. LKj telah menyajikan analisis data pembandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah/renstra secara memadai.
 - c. LKj telah menyajikan informasi data pembandingan dengan kinerja Nasional/Regional/Provinsi/Kabupaten/Kota dengan indikator yang sama (benchmark kinerja)
7. Pengujian atas penyajian analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dalam LKj.
Berdasarkan hasil pengujian atas penyajian analisa penyebab keberhasilan/kegagalan ditemui hal sebagai berikut:
LKj telah menyajikan penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
8. Pengujian atas penyajian efisiensi penggunaan sumber daya pada LKj.
Berdasarkan hasil pengujian atas penyajian efisiensi penggunaan sumber daya pada LKj ditemui hal sebagai berikut:
LKj telah menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada masing-masing indikator kinerja, namun perhitungan efisiensi terhadap capaian kinerja belum memadai.
9. Pengujian atas penyajian realisasi anggaran.
Berdasarkan hasil pengujian atas penyajian realisasi anggaran ditemui sebagai berikut:
LKJ sudah menyajikan informasi realisasi anggaran yang terkait dengan capaian kinerja.
10. Pengujian atas tindak lanjut atas rekomendasi APIP atas kelemahan LKj tahun sebelumnya.
Berdasarkan hasil Pengujian tindak lanjut atas rekomendasi APIP atas kelemahan LKj tahun 2024 ditemui hal sebagai berikut:
LHE Nomor 700.1.2.1/841/Insp-PS/2025 belum ada ditindaklanjuti yaitu:
1. Perencanaan Kinerja
- a. Dalam merumuskan tujuan agar menggambarkan isu strategis yaitu: "Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional", dan "Terwujudnya inovasi kecamatan".
 - b. Dalam merumuskan sasaran agar menggambarkan isu strategis yaitu: "Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kantor Camat Pancung Soal", dan "Meningkatnya kualitas inovasi daerah".
 - c. Dalam merumuskan sasaran pada renstra agar berorientasi hasil yaitu pada sasaran "Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik", " Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Pancung Soal", dan "Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan nagari".

- d. Dalam merumuskan indikator kinerja tujuan dan indicator kinerja sasaran agar memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevan and Time-bound) yaitu pada indikator kinerja "Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan informasi dokumentasi publik di kecamatan", "Jumlah nagari yang pengelolaan keuangan Baik", dan "Berkurangnya konflik yang terjadi di Kecamatan Pancung Soal".
- e. Indikator Kinerja Utama (IKU) menggambarkan kondisi Kinerja Utama, agar indikator kinerja utama dapat dicapai dan berkelanjutan selama periode renstra yaitu "Indeks kepuasan masyarakat (IKM)", dan "Nilai kematangan inovasi Kecamatan", serta harus didukung dengan anggaran dan aktivitas yang mendukung kinerja sehingga target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja menantang dari realistis.
- f. Rencana aksi kinerja sudah berjalan secara dinamis agar dilakukan pemantauan secara berkala sehingga perbaikan kinerja berhasil dengan baik.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Data kinerja yang dikumpulkan agar relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- b. Pengukuran kinerja agar menjadi dasar untuk penempatan/penghapusan jabatan struktural maupun fungsional, penyesuaian refocusing, penyesuaian strategi, penyesuaian kebijakan, penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran dan efisiensi dalam mencapai kinerja.
- c. Setiap pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Laporan kinerja Kecamatan Pancung Soal agar digunakan untuk penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan kerja dan perubahan budaya organisasi.
- b. Perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya agar dilakukan secara memadai, dan mempertimbangkan antara anggaran, realisasi anggaran dan capaian keluaran.

4. Evaluasi Kinerja

- a. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Pancung Soal agar dijadikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan pemanfaatan perbaikan kinerja, efektivitas dan efisiensi kinerja.
- b. Implementasi nilai SAKIP tahun 2025 agar ditingkatkan sehingga capaian nilai SAKIP lebih baik disbanding dengan sebelumnya.

Disarankan kepada Bupati Pesisir Selatan agar memerintahkan Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Melengkapi dokumen pendukung LKj sebagai berikut:
 - a. Renstra Perangkat Daerah
 - b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025
 - c. Indikator Kinerja Utama OPD
 - d. Dokumen penjelasan IK Kepala OPD
 - e. Data dukung capaian kinerja yang disajikan dalam LKj OPD
 - f. Matriks tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Tahun sebelumnya
 - g. Realisasi Rencana Aksi Kepala OPD TW II Tahun 2025
 - h. Form Rekap DPA 2.2. SKPD TA 2025
 - i. Form keselarasan anggaran
 - j. Melengkapi crosscutting (jika ada)
2. Pada outline LKj agar melengkapi penyajian sebagai berikut:
 - a. Pada BAB I agar menyajikan informasi Aspek Strategi Organisasi dan Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi.
 - b. Pada Laporan Kinerja agar melampirkan Perjanjian Kinerja Individu
3. Dokumen Renstra, PK dan LKj diselaraskan dalam menetapkan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, sasaran strategis, dan indikator kinerja sebagai berikut.
 - a. Agar melengkapi dokumen renstra
 - b. Agar menentukan tujuan pada PK diselaraskan dengan tujuan Renstra
 - c. Agar indikator tujuan disajikan dalam PK dan LKj dan diselaraskan dengan Renstra
4. Pengujian atas kesesuaian target kinerja pada LKj dengan target pada Renstra dan PK Tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Agar Perangkat Daerah melengkapi dokumen Renstra

- b. Agar dalam penyusunan LKj, penetapan target indikator kinerja tidak hanya mengacu pada PK, tetapi juga memperhatikan kesesuaian dengan Renstra.
5. Kesesuaian capaian kinerja pada LKj dengan data kinerja sebagai berikut:
Agar Perangkat Daerah melengkapi dokumen IKU
6. Agar menyajikan pada LKj perhitungan efisiensi atas capaian kinerja secara memadai.
7. Agar menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Nomor 700.1.2.1/841/Insp-PS/2025 Tahun 2024 pada LKj 2025.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kegiatan reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

Demikian hasil reviu ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Evafauza Yuliasman, S.E., MSi.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19670712 199202 1 001

Tembusan:

1. Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan di Inderapura.

**CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	KONDISI/PERMASALAHAN	KONDISI SEHARUSNYA	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)			
	Reviu terhadap dokumen pendukung LKj belum lengkap. Berdasarkan hasil pengujian atas kelengkapan dokumen reviu Laporan Kinerja (LKj) ditemui Dokumen LKj belum dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 3. Indikator Kinerja Utama OPD 4. Dokumen Penjelasan IK Kepala OPD 5. Data Dukung Capaian Kinerja yang disajikan dalam LKj OPD 6. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Tahun sebelumnya 7. Realisasi Rencana Aksi Kepala OPD TW II Tahun 2025 8. Form Rekap DPA 2.2. SKPD TA 2025 9. Form keselarasan anggaran 10. Crosscutting (jika ada)	Reviu LKj dilengkapi dengan dokumen pendukung yang digunakan untuk penyusunan LKj Perangkat Daerah, yaitu: 1. Renstra Perangkat Daerah. 2. RKT 2025 3. IKU OPD 4. Dokumen Penjelasan IK Ka OPD 5. PK Ka OPD dan pejabat lainnya 6. Laporan Kinerja Tahun 2025 7. Data Dukung Capaian Kinerja yang disajikan dalam LKj OPD. 8. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Th sebelumnya 9. Rencana Aksi Ka OPD Tahun 2025 10. Realisasi Rencana Aksi Kepala OPD Tahun 2025 (Tw I s.d. IV) 11. Pengukuran Kinerja Kepala OPD Tahun 2025 12.a Form Rekap DPA 2.2. SKPD TA 2025 12.b Form keselarasan anggaran 13.a Cascading Tahun 2025 13.b Crosscutting (jika ada) 14. Surat Penyampaian LKj ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pesisir Selatan beserta tanda terima 15. Dokumen bukti dukung penghargaan yang diperoleh pada tahun 2025	Agar melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 3. Indikator Kinerja Utama OPD 4. Dokumen Penjelasan IK Kepala OPD 5. Data Dukung Capaian Kinerja yang disajikan dalam LKj OPD 6. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Tahun sebelumnya 7. Realisasi Rencana Aksi Kepala OPD TW II Tahun 2025 8. Form Rekap DPA 2.2. SKPD TA 2025 9. Form keselarasan anggaran 10. Crosscutting (jika ada)	Telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti
2	Pengujian atas Kesesuaian Outline LKj Perangkat Daerah dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah			

a.	Outline pada BAB I belum menyajikan Informasi tentang Aspek Strategi Organisasi dan Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi.	Outline BAB I: BAB I Pendahuluan 1. Gambaran Umum Organisasi 2. Aspek Strategic Organisasi 3. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi	Pada BAB I Agar menyajikan Informasi Aspek Strategi Organisasi dan Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi.	Telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti.
b.	Outline pada BAB II telah sesuai.	outline BAB II: BAB II Perencanaan Kinerja uraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.	-	-
c.	Outline pada BAB III telah sesuai.	outline BAB III: BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. (dua tahun terakhir) 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan kinerja nasional, provinsi atau kabupaten/kota lainnya (benchmark kinerja). 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	-	-

		B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.		
	Pada Lampiran LKj belum melampirkan Dokumen Perjanjian Kinerja Individu	Pada Lampiran: Lampiran Perjanjian Kinerja Individu	Pada Lampiran: Agar melampirkan Dokumen Perjanjian Kinerja Individu	Telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti.
3	PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN TUJUAN SASARAN PADA LKj OPD DENGAN RENSTRA DAN PK TAHUN 2025			
	1. Dokumen renstra tidak ada 2. Tujuan tidak ada dalam PK 3. Indikator Tujuan tidak ada dalam PK dan LKj 4. Sasaran dan indikator sasaran dalam dokumen PK sesuai dengan yang tercantum dalam LKj	• Antara dokumen Renstra, PK dan LKj selaras dalam menetapkan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja. Jika terjadi perbedaan, agar disertakan dengan penjelasan yang memadai. • Seluruh tujuan, sasaran pada PK disajikan dalam LKj OPD	1. Agar melengkapi dokumen renstra 2. Agar menentukan Tujuan pada PK diselaraskan dengan Tujuan Renstra 3. Agar Indikator Tujuan disajikan dalam PK dan LKj dan diselaraskan dengan Renstra	Telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti.
4	PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN TARGET KINERJA PADA LKj DENGAN TARGET PADA PK dan RENSTRA TAHUN 2025			
	1. Dokumen Renstra tidak ada 2. Penetapan target indikator kinerja pada LKj telah mengacu pada PK, namun tidak dapat dipastikan kesesuaiannya dengan Renstra karena dokumen Renstra tidak tersedia. 3. LKj sudah menyajikan cara menetapkan target 4. Seluruh target kinerja yang dimuat pada dokumen PK telah disajikan dalam LKj	1. Antara dokumen Renstra, PK dan LKj selaras dalam menetapkan Target Kinerja. Jika terjadi perbedaan, agar disertakan dengan penjelasan yang memadai. 2. Pada LKj memuat cara dalam menetapkan Target. 3. Seluruh target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen PK disajikan dalam LKj.	1. Agar Perangkat Daerah melengkapi dokumen Renstra 2. Agar dalam penyusunan LKj, penetapan target indikator kinerja tidak hanya mengacu pada PK, tetapi juga memperhatikan kesesuaian dengan Renstra.	Telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti.
5	PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA DENGAN DATA KINERJA SECARA RINCI/ANALISA YANG MEMADAI DALAM LKj			
	1. Dokumen IKU tidak ada 2. Analisa LKj sudah menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target tahunan 3. Analisa LKj sudah menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka	1. LKj menyajikan formula dalam mencapai kinerja dan selaras dengan formula yang ditetapkan dalam IKU. 2. LKj menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target tahunan.	1. Agar Perangkat Daerah melengkapi dokumen IKU	Telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti.

	menengah/periode renstra 4. Kesesuaian analisis kinerja pada LKj dengan data dukung yang bersumber dari IKU tidak dapat dipastikan karena dokumen IKU tidak tersedia 5. Perhitungan persentase capaian kinerja telah sesuai 6. Seluruh tujuan, sasaran dan indikator kinerja telah memuat capaian kinerja dan telah memuat analisa yang memadai	3. LKj menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah/periode renstra. 4. LKj menyajikan data dukung (sumber data) atas kinerja yang disajikan. 5. Seluruh tujuan, sasaran dan indikator kinerja memuat capaian kinerja dan telah memuat analisa yang memadai		
6	PENGUJIAN ATAS PENYAJIAN LKj OPD DENGAN DATA PEMBANDING YANG DIBUTUHKAN			
	1. LKj telah menyajikan analisis data pembanding target, realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir secara memadai. 2. LKj telah menyajikan analisis data pembanding realisasi kinerja dengan target jangka menengah/renstra secara memadai. 3. LKj telah menyajikan informasi data pembanding dengan kinerja nasional/regional/Provinsi/Kabupaten Kota dengan indikator yang sama (benchmark kinerja).	1. LKj menyajikan analisis data pembanding capaian kinerja dengan tahun sebelumnya secara memadai. 2. LKj menyajikan analisis data pembanding capaian kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya (minimal selama periode renstra) secara memadai. 3. LKj menyajikan analisis data pembanding dengan kinerja nasional/regional/Provinsi/Kabupaten Kota dengan indikator yang sama (benchmark kinerja) secara memadai.	Telah sesuai	Telah sesuai
7	PENGUJIAN ATAS PENYAJIAN ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DALAM LKj			
	LKj telah menyajikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.	LKj menyajikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.	Telah sesuai	Telah sesuai
8	PENGUJIAN ATAS PENYAJIAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PADA LKj			
	LKj telah menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada masing-masing indikator kinerja, namun perhitungan efisiensi terhadap capaian kinerja belum memadai.	LKj menyajikan efisiensi sumber daya untuk seluruh indikator kinerja yang dijanjikan dalam PK OPD	Agar menyajikan pada LKj perhitungan efisiensi atas capaian kinerja secara memadai	Telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti
9	PENGUJIAN ATAS PENYAJIAN REALISASI ANGGARAN			
	LKJ sudah menyajikan informasi realiasi anggaran yang terkait dengan capaian kinerja.	LKJ menyajikan realiasi anggaran yang terkait dengan kinerja berdasarkan form keselarasan anggaran	Telah sesuai	Telah sesuai

10	PENGUJIAN ATAS TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI APIP ATAS KEKURANGAN LKj TAHUN SEBELUMNYA			
	LHE Nomor 700.1.2.1/841/Insp-PS/2025 belum ada ditindaklanjuti yaitu: 1. Perencanaan Kinerja - Dalam merumuskan tujuan agar menggambarkan isu strategis yaitu: "Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan professional", dan "Terwujudnya inovasi kecamatan". - Dalam merumuskan sasaran agar menggambarkan isu strategis yaitu: "Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kantor Camat Pancung Soal", dan "Meningkatnya kualitas inovasi daerah". - Dalam merumuskan sasaran pada renstra agar berorientasi hasil yaitu pada sasaran "Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public", "Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Pancung Soal", dan "Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan nagari". - Dalam merumuskan indikator kinerja tujuan dan indicator kinerja sasaran agar memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevan and Time-bound) yaitu pada indikator kinerja "Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan informasi dokumentasi publik di kecamatan", "Jumlah nagari yang pengelolaan keuangan Baik", dan "Berkurangnya konflik yang terjadi di Kecamatan Pancung Soal". - Indikator Kinerja Utama (IKU) menggambarkan kondisi Kinerja Utama, agar indikator kinerja utama dapat dicapai dan berkelanjutan selama periode renstra yaitu "Indeks kepuasan masyarakat	Seluruh rekomendasi untuk perbaikan laporan kinerja tahun sebelumnya ditindaklanjuti dalam LKj OPD tahun 2025 secara optimal.	Agar menindaklanjuti Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Nomor 700.1.2.1/841/Insp-PS/2025 Tahun 2024 pada LKj 2025.	Telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti.

	(IKM)", dan "Nilai kematangan inovasi Kecamatan", serta harus didukung dengan anggaran dan aktivitas yang mendukung kinerja sehingga target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja menantang dari realistis. f. Rencana aksi kinerja sudah berjalan secara dinamis agar dilakukan pemantauan secara berkala sehingga perbaikan kinerja berhasil dengan baik. 2. Pengukuran Kinerja a. Data kinerja yang dikumpulkan agar relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. b. Pengukuran kinerja agar menjadi dasar untuk penempatan/penghapusan jabatan struktural maupun fungsional, penyesuaian refocusing, penyesuaian strategi, penyesuaian kebijakan, penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran dan efisiensi dalam mencapai kinerja. c. Setiap pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. 3. Pelaporan Kinerja a. Laporan kinerja Kecamatan Pancung Soal agar digunakan untuk penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan kerja dan perubahan budaya organisasi. b. Perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya agar dilakukan secara memadai, dan mempertimbangkan antara anggaran, realisasi anggaran dan capaian keluaran. 4. Evaluasi Kinerja a. Rekomendasi atas hasil evaluasi			
--	--	--	--	--

	akuntabilitas kinerja Kecamatan Pancung Soal agar dijadikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan pemanfaatan perbaikan kinerja, efektivitas dan efisiensi kinerja. b. Implementasi nilai SAKIP tahun 2025 agar ditingkatkan sehingga capaian nilai SAKIP lebih baik disbanding dengan sebelumnya.			
--	---	--	--	--

**) Tanggung jawab tim terbatas pada dokumen yang diserahkan oleh Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan*

Painan, 4 Maret 2026
WAKIL PENANGGUNG JAWAB,



RIO SYANDRA, S.S.T., S.T.
 NIP. 19810707 200501 1 010